



# URGENSI PEMBENTUKAN

RUU Perubahan Iklim

*Mohammad Mova AlAfghani  
Chenny Wongkar*

# LATAR BELAKANG

Perubahan Iklim Bukan Isu Lingkungan Semata, Melainkan Ancaman Langsung Terhadap Kedaulatan NKRI.



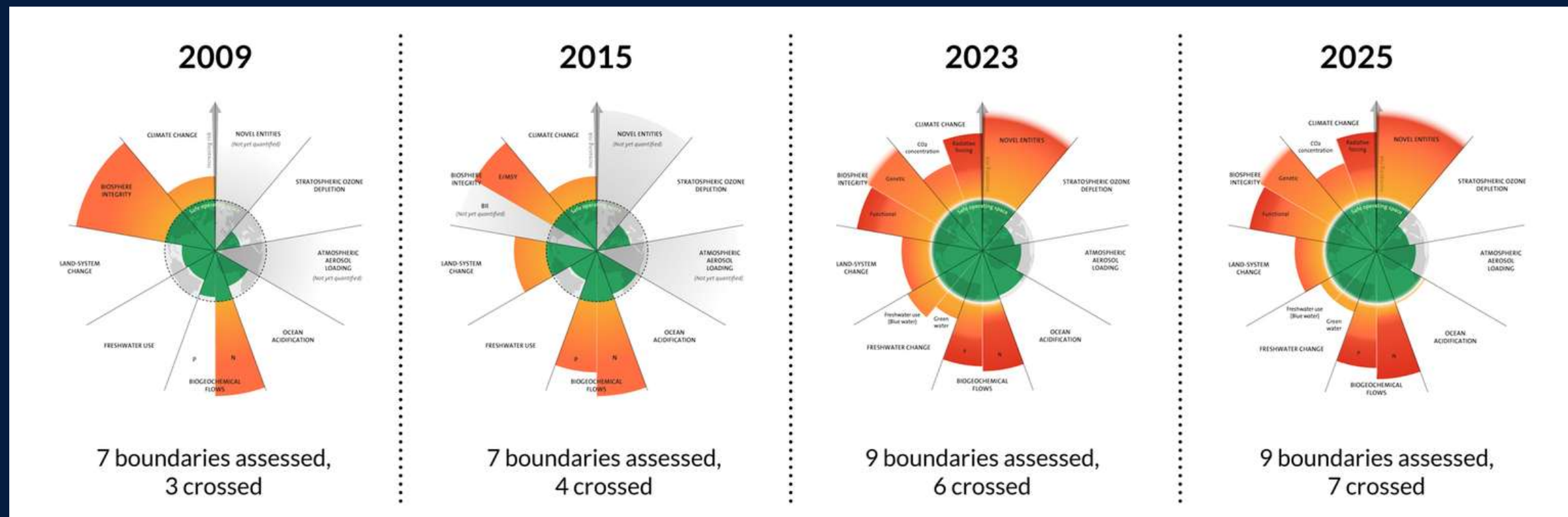
Konstitusi mengamankan negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Krisis iklim menguji kemampuan negara dalam menjalankan amanat tersebut.



Potensi kegagalan sistemik pada sektor pangan, air, dan keamanan wilayah akibat kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem.



Diperlukan sebuah landasan hukum yang kokoh, komprehensif, dan progresif untuk mengelola krisis ini secara terstruktur. Undang-Undang Iklim adalah sarannya.



7 dari 9  
Batasan Planet  
Terlampau di  
tahun 2025

<https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html>

3-degree limit  
could be  
exceeded as  
early as 2050

**KLIMAAUFRUF 2025**  
Ein Aufruf zu entschlossenem Handeln

DEN VOLLSTÄNDIGEN AUFRUF MIT ERLÄUTERUNGEN UND LITERATURHINWEISEN FINDEN SIE UNTER:

Ein gemeinsamer Aufruf der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

DMG Deutsche Meteorologische Gesellschaft DPG Deutsche Physikalische Gesellschaft

**3-GRAD-GRENZE KÖNNTE SCHON UM 2050 ÜBERSCHRITTEN WERDEN**

Es ist nicht mehr zu leugnen: Der Klimawandel schreitet ungebremst voran und beschleunigt sich. In den Jahren 2023 und 2024 lagen die globalen Durchschnittstemperaturen erstmals 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Es ist sogar möglich, dass die in Paris beschlossene 1,5-Grad-Grenze der globalen Erwärmung bereits dauerhaft überschritten sein könnte.

Inzwischen ist selbst die Verpflichtung, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, nur noch mit erheblichen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft erreichbar, und es besteht eine wachsende Gefahr, dass dieses Ziel verfehlt wird. Die globale Erwärmung ist in eine Phase der Beschleunigung eingetreten. Bereits um das Jahr 2050 könnte die Erwärmung sogar 3 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erreichen, wobei der Temperaturanstieg in Deutschland deutlich höher als im globalen Mittel ausfällt. Ergebnisse von Klimamodellen deuten darauf hin, dass bis Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung bis zu 5 Grad wahrscheinlich ist. Dies kann nur noch durch ein Umsteuern der Menschheit verhindert werden.

See what three degrees of global warming looks like

Climate change • Climate change refers to long-term shifts in temperatures and...

**What 3°C of global warming looks like**

Watch on YouTube

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...*

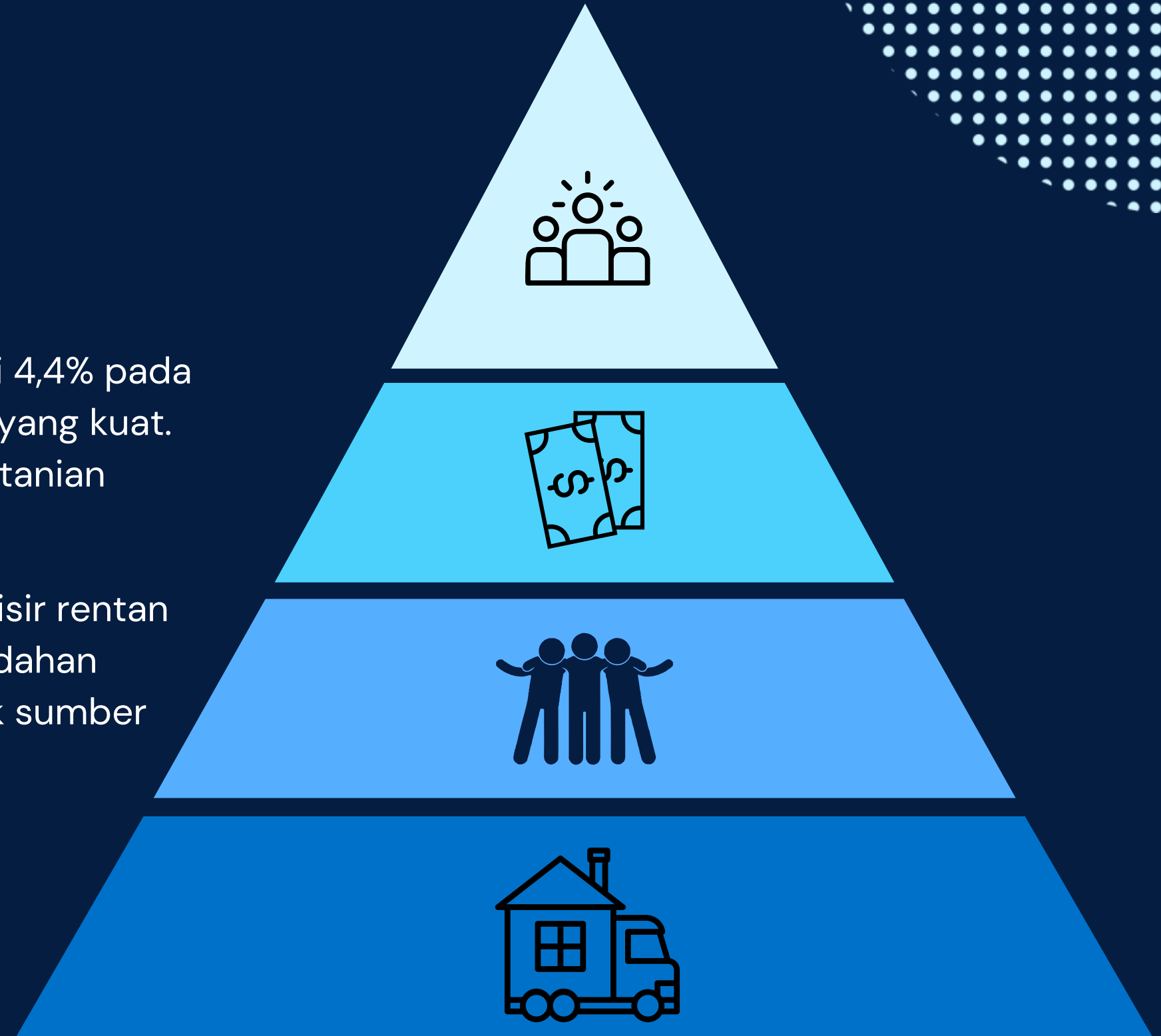
# DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

**01 Keamanan Nasional.** 115 pulau terancam tenggelam pada tahun 2100, mengancam integritas teritorial dan kedaulatan negara.

**02 Ekonomi.** Potensi kerugian PDB dapat mencapai 4,4% pada 2050 dan 13,27% pada 2100 tanpa aksi mitigasi yang kuat. Sektor perikanan (7 juta lapangan kerja) dan pertanian terancam.

**03 Sosial & Kependudukan.** 42 juta penduduk pesisir rentan terhadap kenaikan muka air laut. Potensi perpindahan massal dapat memicu tekanan sosial dan konflik sumber daya.

**04 Kesehatan.** Peningkatan frekuensi banjir dan suhu ekstrem memperbesar risiko penyakit tular vektor (DBD) dan penyakit tular air (diare), serta ancaman malnutrisi.



# 8 ASAS PENGATURAN

## Uji Tuntas yang Ketat/Stringent Due Diligence

Kewajiban aktif negara untuk mengevaluasi secara komprehensif setiap kebijakan yang berimplikasi pada iklim.

## Keadilan Iklim

Melindungi kelompok rentan yang menanggung beban terbesar dari krisis iklim

## Keadilan Antar Generasi

Menjamin hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang aman dan lestari

## Ilmu Pengetahuan & Pengetahuan Adat:

Mengintegrasikan sains modern dengan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan.

## Tanggung Jawab Negara:

Menegaskan bahwa penanganan krisis iklim adalah kewajiban konstitusional, bukan pilihan politik.

## Integrasi Sistemik

Menerapkan pendekatan whole-of-government yang melampaui ego sektoral.

## Manajemen Adaptif

Membangun sistem hukum dan perencanaan yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan cepat.

## Kelestarian Lingkungan Hidup

Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan integritas ekologis.

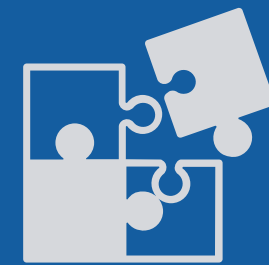


# ARSITEKTUR KELEMBAGAAN & PERENCANAAN TERINTEGRASI



## PEMBENTUKAN OTORITAS IKLIM NASIONAL

- Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Berfungsi sebagai koordinator, integrator, dan evaluator kebijakan iklim lintas kementerian/lembaga.
- Mengelola Dana Perubahan Iklim Nasional untuk memobilisasi pendanaan domestik dan internasional.



## SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI MELALUI RPPI

- Dokumen perencanaan berjenjang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
- Mengintegrasikan target mitigasi dan pemetaan kerentanan adaptasi dalam satu kerangka yang koheren.
- Memastikan target iklim menjadi dasar dari seluruh perencanaan pembangunan (RPJMN & RPJMD) bukan dokumen terpisah.



# FOKUS KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM RUU IKLIM

## Target Mitigasi yang Mengikat

Penetapan target Nol Emisi Bersih (Net Zero Emission) sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar aspirasi politik, dengan prinsip non-regression (target tidak boleh mundur).

Memberikan porsi setara antara mitigasi dan adaptasi. Fokus adaptasi pada ketahanan pangan, sumber daya air, kelautan & pesisir, kesehatan, dan infrastruktur kritis.

## Prioritas Adaptasi Negara Kepulauan

## Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions)

Memprioritaskan perlindungan dan restorasi ekosistem (mangrove, gambut, terumbu karang) sebagai infrastruktur alami untuk mitigasi dan adaptasi.

Mengatur secara komprehensif perdagangan karbon, pajak karbon, dan pembayaran berbasis kinerja untuk mendorong dekarbonisasi.

## Instrumen Ekonomi Karbon



# RUU IKLIM SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KEADILAN DAN TATA KELOLA YANG BAIK

## Mekanisme Transisi Berkeadilan (Just Transition)



Memberikan perlindungan bagi pekerja dan komunitas yang terdampak oleh transisi energi (dana transisi, program reskilling, jaring pengaman sosial)

## Transparansi & Akuntabilitas Korporasi



Mewajibkan korporasi skala besar dan lembaga jasa keuangan untuk melaporkan risiko dan peluang iklim (mengadopsi kerangka TCFD)

## Kerangka Hukum Perpindahan Penduduk



Mengantisipasi perpindahan massal akibat dampak iklim dengan perencanaan yang matang pada daerah asal dan daerah penerima

## Akses Informasi, Partisipasi & Keadilan



Menjamin hak publik untuk mengakses data, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengajukan gugatan (legal standing).

# Sistem Hukum Adaptif

Undang-undang lebih mengatur prinsip-prinsip dan aturan umum, sementara aturan-aturan khusus seperti terkait parameter dan angka-angka diatur lewat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang ditinjau secara berkala



## *Reformasi Peraturan Sektoral*

*Seluruh peraturan perundang-undangan diharuskan untuk mengatur mitigasi dan adaptasi di masing-masing sektor.*

MAHKAMAH KO



# Adaptasi Sektor Keuangan



Sektor Perbankan dan Keuangan diwajibkan untuk menghitung exposure akibat perubahan iklim, baik dari sisi adaptasi terhadap dampak maupun dari sisi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan

Peraturan Keuangan Negara dimodifikasi untuk memperbolehkan investasi berbagai kegiatan adaptasi perubahan iklim dalam horizon waktu yang panjang.

Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa diharuskan untuk memasukkan faktor adaptasi dan mitigasi belanja barang dan jasa pemerintah

Sejauh mana dimungkinkan, sektor perasuransian diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap bencana iklim

# PENCEGAHAN “REGULATORY CAPTURE”

Seluruh rangkaian proses perancangan Undang-Undang iklim, termasuk tahapan pembuatan kebijakan serta pelaksanaannya, termasuk pembuatan memerlukan keterlibatan masyarakat dan transparansi penuh

Otoritas iklim diberi kewajiban untuk memberikan laporan berkala serta melakukan evaluasi atas berbagai program dan kegiatan terkait perubahan iklim dari berbagai kementerian dan lembaga





# PENUTUP

## KESIMPULAN

Bencana iklim adalah ancaman nyata yang berisiko melumpuhkan fondasi ekonomi, sosial, dan kedaulatan NKRI. Tanpa payung hukum yang kuat, respons kita akan tetap bersifat parsial, reaktif, dan tidak efektif

---

## REKOMENDASI

- Menjadikan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai prioritas legislasi nasional.
- Membentuk Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi untuk mempercepat pembahasan RUU dengan melibatkan pakar, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung studi mendalam dan penyiapan implementasi Undang-Undang Iklim.



*Center for Regulation Policy and  
Governance (CRPG)*

# Terima Kasih



+62 896-3851-1994



[www.crpq.info](http://www.crpq.info)

